

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- , *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Prajitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, Selaras, Malang, 2013.
- Ramelan. Eman, *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
- , *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- , *Perolehan Hak Atas Tanah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2011.

- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Soesilo, R, *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.64.
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### **Peraturan Perundang - undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (LN Tahun 1961 No. 288 – TLNRI No. 2324).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (LN Tahun 1996 No. 42 – TLNRI No. 3632).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2011 No 82 – TLNRI No. 5234).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (LN Tahun 2012 No. 22 - TLNRI No. 5280).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2014 Nomor 3 – TLNRI No. 5491).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. (LN Tahun 1977 No. 38 - TLNRI No. 3107).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (LN Tahun 1996 No. 58 – TLNRI No. 3643).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia LN Tahun 1996 No. 59 – TLNRI No. 3644).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 No. 59 – TLNRI No. 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (LN Tahun 1998 No. 52 – TLNRI No. 3746).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (LN Tahun 2012 No. 156).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.